

**ANALISIS KETERGANTUNGAN DAERAH PERIKANAN
SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN PROGRAM
PEMBERDAYAAN NELAYAN: STUDI KASUS DI
KABUPATEN CIREBON DAN INDRAMAYU**
*(Fisheries Dependences Indices Analysis as a Basic Implementation
of Fishermen Empowerment Program: Case Study in Cirebon and
Indramayu).*

Oleh :

*Iwan Setiawan¹⁾, Daniel R. Monintja²⁾, Victor P.H. Nikijuluw³⁾, M. Fedi A.
Sondita²⁾*

Diterima : 24 Maret 2007 ; Disetujui Juli 2007

ABSTRACT

This paper is a part of the objectives of a study on impacts of fisheries policy, institutional building and individual entrepreneurship to capture fisheries performance. In order to understand the impacts the study on the capture fisheries performance was conducted in Cirebon and Indramayu. As a first step of the study, this study identified fisheries dependences indices for both locations by multi criteria analysis (MCA). In this study, fisheries dependences indices was analysed by five indicator namely ratio of number of fishermen to total resident (fishermen ratio), ratio of total catch in district/citizen level to total catch in province level (catch ratio), ratio of total income district/citizen from fisheries to product domestic regional bruto in province level (income ratio), ratio of total fisheries employment in district/citizen level to total fisheries employment in province level (fisheries employment ratio) and ratio of total number of fisheries vessel in district/citizen level to total number of fisheries vessel in province level. The results showed that although both location operating in a similar overfishing fisheries condition, fisheries dependences indices analysis indicated that Indramayu have higher dependency to capture fisheries activities than Cirebon. From five indicators, Indramayu lead in four indicators (fishermen ratio, catch ratio, income ratio and fisheries employment ratio) comparing to Cirebon that only lead in one indicator (vessel ratio).

Keywords: *Fisheries dependences indices, multi criteria analysis (MCA), fisheries empowerment, Cirebon, Indramayu*

1) *Direktorat Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan Indonesia, Email: iwari77@yahoo.co.id*

2) *Staf Pengajar Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan FPIK IPB*

3) *Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasaran Pengelolaan Hasil Perikanan (P2HP), DKP*

ABSTRAK

Dalam rangka memahami pengaruh kebijakan publik, perikanan kelembagaan dan kemampuan berbisnis individu terhadap kinerja perikanan tangkap, kajian tentang kinerja perikanan tangkap skala kecil telah dilakukan di Cirebon dan Indramayu. Sebagai langkah awal penelitian ini adalah mengkaji ketergantungan daerah terhadap sektor perikanan dengan menggunakan *multi criteria analysis (MCA)* (Adrianto, 2005). Dalam penelitian ini, ketergantungan daerah perikanan dianalisis dengan menggunakan lima indikator, yaitu 1) rasio jumlah nelayan terhadap total penduduk di kabupaten (rasio nelayan), 2) rasio total produksi hasil tangkapan di kabupaten terhadap total hasil tangkapan di propinsi (rasio hasil tangkapan), 3) rasio total pendapatan nelayan di kabupaten terhadap PDRB di propinsi (rasio pendapatan), 4) rasio jumlah nelayan terhadap total penduduk di kabupaten (rasio nelayan), 5) rasio total perahu perikanan di kabupaten terhadap total perahu perikanan di propinsi (rasio perahu perikanan). Hasil analisis ini menunjukkan bahwa walaupun kedua lokasi mempunyai kesamaan kondisi daerah penangkapan yang tergolong *overfishing*, Kabupaten Indramayu cenderung mempunyai tingkat ketergantungan perikanan yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Cirebon. Dari lima indikator, Indramayu mempunyai empat indikator yang mempunyai nilai lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Cirebon yaitu rasio nelayan, rasio hasil tangkapan, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan rasio jumlah tenaga kerja. Dengan kata lain, Indramayu relatif lebih tergantung terhadap sektor perikanan dibanding Cirebon.

Kata kunci: ketergantungan daerah perikanan, kriteria multi analisis (MCA), program pemberdayaan nelayan, Cirebon, Indramayu

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan nelayan, penurunan hasil tangkapan dan kerusakan ekosistem perairan, pada hakikatnya merupakan proses sebab-akibat yang tidak dapat terpisahkan (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 2004; Fauzi, A. 2005; Nikijuluw, 2005; BPS, 2004 dan Smeru, 2004 *diacu dalam* Pedoman Umum Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir/PEMP, 2004). Kemiskinan nelayan diyakini menjadi salah satu pendorong menurunnya sumberdaya ikan. Ketiadaan mata pencaharian alternatif dan minimnya permodalan, menjadikan pantai (zona yang produktivitas dan keberagaman sumberdayanya paling tinggi) mengalami tekanan penangkapan yang luar biasa sehingga hasil

tangkapan nelayan menurun dari tahun ke tahun. Akibat lanjutannya adalah kompetisi antar alat tangkap semakin meningkat dan kegiatan menangkap ikan semakin sulit. Tanpa disadari kondisi tersebut telah mendorong nelayan untuk melakukan kegiatan penangkapan yang merusak ekosistem, seperti penggunaan bahan peledak, potasium dan pengoperasian alat-alat tangkap yang merusak ekosistem lainnya.

Kemiskinan, ternyata juga telah menyebabkan rendahnya kapasitas masyarakat pesisir khususnya nelayan, yang dapat dilihat dari kegiatan ekonomi yang mereka lakukan. Usaha mereka biasanya hanya terpaku pada kegiatan penangkapan ikan saja, yang terpaku pada pemenuhan ikan segar hasil tangkapan. Sedangkan kegiatan pascapanen yang dapat menghasilkan nilai tambah justru dilakukan oleh pedagang dan pengolah ikan, yang mengambil alih porsi peningkatan nilai tambah melalui perubahan bentuk produk (proses pengolahan), perubahan waktu penjualan (proses penyimpanan), dan perubahan tempat dan waktu penjualan (proses transportasi). Akibatnya porsi nilai tambah yang didapatkan oleh nelayan relatif kecil.

Berbagai kebijakan pembangunan perikanan yang bertujuan untuk mengubah kondisi tersebut menjadi lebih baik, termasuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan mengentaskan kemiskinan (Saad, 2000 *diacu dalam* Fatchudin, 2006) telah banyak dilakukan. Pemerintah melalui Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dan lembaga-lembaga keuangan sudah banyak menelurkan kebijakan yang terkait dengan pemberdayaan sektor perikanan khususnya yang terkait dengan kendala *financial capital* di sektor perikanan, namun sampai saat ini kebijakan/program pemberdayaan tersebut belum secara signifikan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan.

Berkaitan dengan kebijakan/program yang belum berdampak secara signifikan tersebut, maka patut diduga bahwa program dan kegiatan tersebut dialokasikan kepada daerah yang sebetulnya tidak perlu mendapatkan program pemberdayaan, atau dengan kata lain bukan daerah yang tergantung kepada perikanan. Sehingga program tersebut tidak mendapat respon positif karena tidak sesuai dengan karakteristik perikanan dalam arti luas. Oleh karena itu agar program-program pemberdayaan yang dialokasikan ke daerah sasaran bisa

berdampak bagi peningkatan kesejahteraan nelayan, maka penentuan lokasi pemberdayaan perlu didasari dengan analisis ketergantungan daerah perikanan.

2. TUJUAN PENELITIAN

- 1) Menentukan tingkat ketergantungan daerah penelitian terhadap perikanan, dan
- 2) Menganalisis variabel-variabel yang membedakan ketergantungan dua daerah penelitian.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Cirebon dan Indramayu, Jawa Barat. Dipilihnya kedua lokasi tersebut dengan alasan:

- 1) Kedua kabupaten telah relatif lama mendapatkan program pemberdayaan masyarakat nelayan, sehingga diharapkan dampaknya bagi masyarakat kelihatan,
- 2) Kegiatan perikanan tangkap baik di Kabupaten Cirebon dan Indramayu telah mencapai *overfishing* dan menempati daerah penangkapan ikan yang kondisinya tidak jauh berbeda. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan November sampai dengan Desember 2006.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Data dihimpun melalui studi pustaka, yaitu dengan melakukan penelusuran berbagai referensi, buku dan laporan yang relevan dengan bahan penelitian. Data yang dikumpulkan antara lain: jumlah nelayan, jumlah penduduk, jumlah produksi perikanan tangkap, jumlah perahu perikanan di kabupaten/kota, jumlah perahu perikanan di propinsi, jumlah tenaga kerja perikanan di kabupaten/kota, jumlah tenaga kerja perikanan di propinsi, pendapatan asli daerah kabupaten/kota dari sektor perikanan, *product domestic regional bruto* (PDRB) di Kabupaten.

3.3 Analisis Data

Data yang dihimpun ditabulasi dan dikelompokkan berdasarkan kepentingan analisis. Indikator-indikator yang dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

(i) Rasio jumlah nelayan terhadap total penduduk (RN_t)

$$RN_t = \frac{\sum_{i=1}^n N_{ti}}{P_t}$$

Keterangan:

N_{ti} = Jumlah nelayan dari alat tangkap dari sektor ke-i pada tahun t untuk wilayah kabupaten/kodya.

P_t = Total jumlah penduduk pada tahun-t untuk wilayah kabupaten/kota.

N = Jumlah sektor dalam perikanan.

(ii) Rasio jumlah produksi ikan kabupaten/kota terhadap produksi propinsi (RM_t).

$$RM_t = \frac{\sum_{i=1}^n P_{ti}}{P_{tj}}$$

Keterangan:

P_{ti} = Jumlah produksi ikan spesies ke-i pada tahun-t untuk wilayah kab/kota.

P_{Tj} = Jumlah total hasil tangkapan pada tahun-t untuk wilayah provinsi.

n = Jumlah spesies dalam perikanan tangkap.

(iii) Rasio jumlah kapal ikan (RK_t).

$$RK_t = \frac{\sum_{i=1}^n JK_{ti}}{\sum_{i=1}^n K_{Ij}}$$

Keterangan:

- JK_{ti} = Jumlah kapal perikanan dari alat tangkap ke-i pada tahun t untuk wilayah kabupaten/kota.
 KI_{ij} = Jumlah kapal perikanan dari alat tangkap ke-i pada tahun t untuk wilayah provinsi.
 n = Jumlah jenis alat tangkap perikanan.

(iv) Rasio jumlah tenaga kerja sektor penangkapan ikan (RTKP_t).

$$RTKP_t = \frac{\sum_{i=1}^n TKP_{ti}}{\sum_{i=1}^n TK_{ti}}$$

Keterangan:

- TKP_{ti} = Jumlah tenaga kerja perikanan dari sektor ke-i pada tahun-t untuk wilayah kabupaten/kodya.
 TK_{tm} = Jumlah total tenaga kerja dari sektor ke-m pada tahun t untuk wilayah kabupaten/kota.
 n = Jumlah sektor dalam perikanan tangkap.

(v) Kontribusi sektor perikanan (KPI_t).

$$KPI_{ti} = \left[\frac{\sum_{t=1}^n PADP_t}{\sum_{t=1}^n PDB_t} \right] / n$$

keterangan:

- $PADP_t$ = PAD perikanan pada tahun t untuk wilayah kabupaten/kota.
 PDB_t = Produk domestik bruto pada tahun t untuk wilayah provinsi.
 n = Jumlah sektor dalam perikanan.

Berdasarkan rumus-rumus di atas, identifikasi level ketergantungan suatu daerah terhadap sektor perikanan (perikanan dan ekonomi) dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi ketergantungan daerah tersebut terhadap sektor perikanan, dan daerah tersebut dapat diidentifikasi sebagai daerah perikanan.

Analisis yang digunakan untuk menentukan suatu daerah sebagai daerah perikanan atau bukan adalah Analisis Kriteria Ganda (*multi-criteria analysis-MCA*). Langkah pertama adalah pemberian bobot terhadap masing-masing indikator (perikanan dan ekonomi), dan langkah selanjutnya adalah melakukan standarisasi terhadap masing-masing variabel dalam dua indikator yang dianalisis dengan menggunakan rumus standarisasi sebagai berikut (Adrianto, 2004):

$$SV_{mni} = \frac{X_{mi} - \text{Min } X_m}{\text{Max } X_m - \text{Min } X_m}$$

$0 < SV_{mni} < 1$

- m = Variabel dalam indikator ke-i (misal indikator perikanan, $m=6$)
- i = 2 (indikator perikanan dan indikator ekonomi).
- SV_{mni} = Nilai standarisasi variabel ke-m untuk kabupaten/kota ke-n untuk domain ke-i.
- X_{mn} = Nilai variabel ke-m untuk kabupaten/kodya ke-n.
- $\text{Min } X_{mn}$ = Nilai minimal dari variabel ke-m untuk kabupaten/kodya ke-n.
- $\text{Max } X_{mn}$ = Nilai maksimal dari variabel ke-m untuk kabupaten/kodya ke-n.

Selanjutnya dibuat indeks komposit dari indikator-indikator yang diukur, setiap variabel dari masing-masing indikator diasumsikan memiliki bobot sama yaitu 1 ($w=1$) sehingga nilai akhir untuk setiap indikator adalah:

$$NK_i = \frac{\sum_{y=1}^m SV_{yi}}{m}$$

Keterangan:

- NK_i = Nilai komposit untuk indikator i.
- SV_y = Nilai standarisasi variable ke-y dalam domain ke-i.
- m = Jumlah variabel dalam domain ke-i.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis alat tangkap yang dioperasikan oleh nelayan Cirebon berjumlah 10 jenis, yaitu: payang, dogol, pukot pantai, jaring insang hanyut, jaring lingkaran, jaring insang tetap, *trammel net*, bagan tancap, rawai tetap dan pengumpul kerang. Jaring yang paling banyak dioperasikan adalah jaring *trammel net* (2.336 unit). Hampir semua perahu yang digunakan untuk mengoperasikan alat tangkap sudah bermotor. Jumlah perahu yang beroperasi di Cirebon pada tahun 2005 berjumlah 4.838 unit, 4.797 unit di antaranya merupakan kapal motor tempel, sedang jumlah kapal motor adalah 41 unit.

Tenaga kerja yang terserap dalam usaha penangkapan ikan terdiri dari nelayan pemilik atau rumah tangga perikanan (RTP), dan rumah tangga buruh perikanan (RTBP). Secara umum jumlah RTP dan RTBP tahun 2005 meningkat sebesar 0,04 % dari tahun 2004, yaitu sebanyak 24.500 pada tahun 2004 menjadi 24.509 pada tahun 2005.

Jumlah produksi ikan hasil tangkapan di Cirebon pada tahun 2005 mengalami penurunan sebanyak 0,75%. Produksi hasil tangkapan perikanan laut pada tahun 2004 sebesar 40.843 ton, menjadi 40.555 ton pada tahun 2005. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon (2005) menyatakan bahwa penurunan hasil tangkapan tersebut diduga disebabkan oleh terkonsentrasinya penangkapan ikan di pantai. Tingkat kompetisi yang tinggi di daerah pantai diduga telah menyebabkan tingginya tekanan perikanan di pantai dan menyebabkan penurunan hasil tangkapan.

Bila dari jumlah produksi menunjukkan penurunan, nilai produksi perikanan laut justru menunjukkan peningkatan 9,3%. Nilai produksi perikanan laut pada tahun 2004 adalah sebesar Rp.196.363.000,00 meningkat menjadi Rp. 214.639.010 pada tahun 2005.

Pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perikanan juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2004. PAD pada tahun 2004 mencapai Rp.104.098.629,00 dan pada tahun 2005 sektor perikanan mampu menyumbangkan sebanyak Rp. 133.017.949,00

Keragaan perikanan tangkap Kabupaten Cirebon tahun 2005 dapat dilihat pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Keragaan perikanan tangkap di Cirebon tahun 2005

No	Indikator	Nilai
1	Jumlah nelayan (RTP dan RTBP)	24.509
2	Jumlah hasil tangkapan (ton)	40.555
3	Jumlah kapal ikan (unit)	4.838
4	PAD sektor perikanan (Rp)	133.017.949,00

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Cirebon, 2005

Kegiatan penangkapan ikan di Kabupaten Indramayu umumnya dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan alat tangkap anco, sero, pancing, jaring klitik, jaring insang hanyut, *trammel net*, pukot pantai, payang atau lampara, dogol dan *purse seine*. Anco, sero, pancing, jaring klitik, pukot pantai, payang atau lampara, dan dogol biasanya dioperasikan di daerah pantai. Dogol, *trammel net* dan jaring insang hanyut selain dioperasikan nelayan di pantai sekitar perairan Indramayu, juga dioperasikan di lepas pantai, di luar wilayah perairan Indramayu. Sedangkan *purse seine*, biasanya dioperasikan di lepas pantai di luar daerah perairan Indramayu. Secara keseluruhan, jumlah armada penangkapan ikan di Kabupaten Indramayu pada tahun 2005 meningkat 0,09% dari tahun 2004, jumlah armada penangkapan ikan pada tahun 2004 sebanyak 4.463 unit, pada tahun 2005 meningkat menjadi 4.503 unit.

Jumlah rumah tangga perikanan laut juga mengalami peningkatan, pada tahun 2004 sebanyak 30.256, maka jumlah rumah tangga perikanan pada tahun 2005 meningkat menjadi 34.682.

Produksi perikanan laut pada tahun 2005 mengalami peningkatan sebanyak 0,82% dibanding tahun 2004, pada tahun 2004 mencapai 66.789,4 ton per tahun meningkat menjadi 67.339,1 ton per tahun pada tahun 2005. Menurut Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu (2005), peningkatan hasil tangkapan ini disebabkan oleh kenaikan jumlah armada penangkapan, peningkatan diversifikasi alat tangkap, perlindungan sumberdaya alam melalui penetapan daerah konservasi dan perbaikan lingkungan oleh kelompok masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap, serta pemeliharaan alur pelayaran.

Pendapatan asli daerah (PAD) sektor perikanan di Kabupaten Indramayu menunjukkan, bahwa pada tahun 2005 PAD perikanan mampu mencapai 116,08% dari target pemerintah daerah. Target PAD pemerintah dari sektor perikanan sebesar Rp.1.049.400.000,00 maka target yang bisa dicapai adalah sebesar Rp. 1.218.112.374,00

Keragaan perikanan tangkap Kabupaten Indramayu tahun 2005 dapat dilihat pada **Tabel 2**

Tabel 2. Keragaan perikanan tangkap di Indramayu tahun 2005

No.	Indikator	Nilai
1	Jumlah kapal ikan (unit)	4.503
2	Jumlah nelayan (RTP dan RTBP)	34.682
3	Jumlah produksi perikanan laut (ton)	67.339,1
5	PAD sektor perikanan (Rp)	1.218.112,374

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, 2005

4.1 Ketergantungan Perikanan

Masalah kegiatan perikanan merupakan suatu kegiatan yang sangat kompleks, di dalamnya faktor-faktor yang berpengaruh akan saling berkaitan satu dengan lainnya. Sehingga untuk menyelesaikan masalah perikanan seperti demikian perlu dipertimbangkan jenis analisis yang mampu memayungi seluruh faktor yang ada. Salah satu model yang sering digunakan adalah *Multi Criteria Analysis* (MCA). Adrianto (2004), menggunakan metode ini untuk menganalisis keberlanjutan sistem perikanan di Pulau Yason Kagoshima, Jepang. Dalam penelitian ini metode tersebut diadopsi dan dimodifikasi untuk menentukan tingkat ketergantungan perikanan.

Penentuan level ketergantungan daerah terhadap perikanan di Cirebon dan Indramayu, berdasarkan seberapa besar nilai sumbangan sektor perikanan di suatu lokasi kajian relatif terhadap lokasi lainnya. Untuk tujuan tersebut, telah digunakan 5 indikator utama, yaitu: 1) Rasio jumlah nelayan terhadap jumlah penduduk, 2) Rasio jumlah hasil tangkapan di kabupaten terhadap jumlah hasil tangkapan di propinsi, 3) Rasio jumlah kapal ikan di kabupaten terhadap jumlah kapal ikan di propinsi, 4) Rasio jumlah tenaga kerja perikanan kabupaten terhadap

jumlah tenaga kerja di propinsi, dan 5) Kontribusi PAD sektor perikanan Kabupaten.

Level ketergantungan kedua daerah penelitian i dapat dilihat pada **Tabel 3**, yang menunjukkan bahwa Indramayu secara relatif mempunyai tingkat ketergantungan terhadap perikanan lebih tinggi dibandingkan Cirebon. Dari 5 indikator, Indramayu mempunyai nilai skor yang lebih tinggi dari Cirebon pada 4 indikator, yaitu rasio jumlah nelayan, rasio jumlah hasil tangkapan, rasio jumlah tenaga kerja perikanan, dan kontribusi PAD sektor perikanan. Sedangkan Cirebon mempunyai nilai skor yang lebih unggul dibanding Indramayu dalam rasio jumlah kapal ikan.

Tabel 3. Tingkat ketergantungan daerah terhadap perikanan Kabupaten Indramayu dan Cirebon

No.	Indikator	Cirebon		Indramayu	
		Nilai	Skor	Nilai	Skor
1	Rasio jumlah nelayan terhadap penduduk	0,012	0,000	0,020	1,000
2	Rasio jumlah hasil tangkapan kabupaten terhadap propinsi	0,118	0,000	0,214	1,000
3	Rasio jumlah kapal ikan di kabupaten terhadap propinsi	0,309	1,000	0,288	0,000
4	Rasio jumlah tenaga kerja perikanan kabupaten terhadap propinsi	0,109	0,000	0,127	1,000
5	Kontribusi PAD sektor perikanan	13,740	0,000	40,772	1,000
	Total		1,000		4,000
	Rata-rata		0,200		0,800

Hasil kajian ini, merupakan informasi penting yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan perikanan, misalnya bagi program perberdayaan masyarakat informasi ini dapat digunakan untuk menentukan prioritas dan jenis program yang diperlukan. Sedangkan, angka-angka indikator dapat digunakan sebagai acuan untuk memperbaiki kondisi dari masing-masing indikator melalui program-program pembanguna perikanan. Berdasarkan hasil penelitian ini, perbaikan kinerja perikanan di Cirebon yang lebih rendah dibandingkan Indramayu, dapat dilakukan dengan

meningkatkan kinerja perikanan dengan cara meningkatkan produktivitas perikanan. Bagi Indramayu, hasil pengkajian ini juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja perikanan dengan memperhatikan tingginya jumlah penduduk yang berprofesi sebagai nelayan dengan diversifikasi mata pencaharian. Bagi pemerintah pusat, hasil kajian ini dapat digunakan sebagai acuan evaluasi program pemberdayaan. Hasil kajian ini juga dapat dijadikan sebagai dasar penstrataan kegiatan, sehingga prioritas program benar-benar didasarkan atas potensi dan kebutuhan daerah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan:

- 1) Kabupaten Cirebon dan Indramayu memiliki level ketergantungan daerah perikanan yang berbeda;
- 2) Indramayu memiliki tingkat ketergantungan relatif lebih tinggi, yaitu empat variabel lebih unggul daripada Cirebon dari lima variabel yang diukur;
- 3) Cirebon memiliki satu variabel lebih unggul daripada Indramayu dari lima variabel yang diukur.

5.2 Saran

Penentuan daerah sasaran program pemberdayaan perikanan seharusnya didasari oleh analisis tingkat ketergantungan daerah terhadap perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, L., Y. Matsuda, dan Y. Sakuma. 2005. *Assessing Local Sustainability of Fisheries System: A Multi-Criteria Participatory Approach with The Case of Yoron Island, Kagoshima Prefecture, Japan*. *Marine Policy*. 29, 9-23.
- Adrianto, L. 2004. *Analisis Penentuan Daerah Perikanan (Fisheries Dependent Region)*. Working Paper Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL), Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Badan Pusat Statistik, 2004. *Statistik Kesejahteraan Rumah Tangga*. BPS, Jakarta
- Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cirebon. 2005. *Laporan Tahunan Perikanan dan Kelautan 2005*. Cirebon.
- Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu. 2005. *Laporan Tahunan Perikanan dan Kelautan 2005*. Indramayu.
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. 2004. *Statistik Perikanan Tangkap Tahun 2004*. Ditjen Perikanan Tangkap, DKP Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2004. *Pedoman Umum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Tahun 2004*. Jakarta
- Fatchudin. 2006. *Analisis Kebijakan Perkreditan untuk Pengelolaan Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan*. *Disertasi Sekolah Pascasarjana IPB*. Bogor
- Fauzi, A. 2005. *Kebijakan Perikanan dan Kelautan. Isu, Sintesis, dan Gagasan*. PT.Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Nikijuluw, V.P.H. 2005. *Politik Ekonomi Perikanan: Bagaimana dan Kemana Bisnis Perikanan?* Penerbit Feraco. Jakarta.